

Analisis Fraud Hexagon dan tata kelola perusahaan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan

M. Rizkiawan ^a, Subagio Subagio ^b

Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan 15222, Indonesia

^a rizkiawan.edu@gmail.com; ^b subagio@pknstan.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh Fraud Hexagon dan Tata Kelola Perusahaan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Penelitian ini mempergunakan dua variabel independen, antara lain fraud Hexagon yang tersusun dari enam faktor dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini mempergunakan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan BUMN serta entitas afiliasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Regresi logistik menjadi metode yang dipilih untuk melakukan analisis data. Berdasarkan hasil uji, ditemukan pengaruh yang sangat signifikan pada pengujian kesempatan dan rasionalisasi terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, ditemukan pengaruh yang signifikan pada pengujian tekanan dan kapabilitas terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, dan ditemukan pengaruh yang cukup signifikan pada pengujian kolusi terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, sedangkan arogansi dan tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

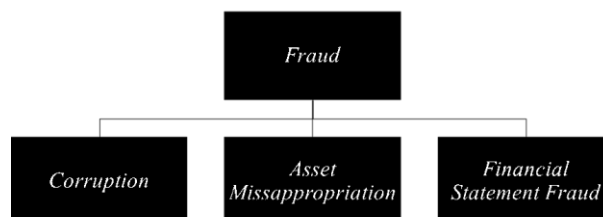
Kata Kunci: Kecurangan Laporan Keuangan; Fraud Hexagon; Tata Kelola Perusahaan; BUMN

How to Cite: M. Rizkiawan, & Subagio. Fraud Hexagon and corporate governance analysis on the potential fraud in financial statements. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 269-282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.909>



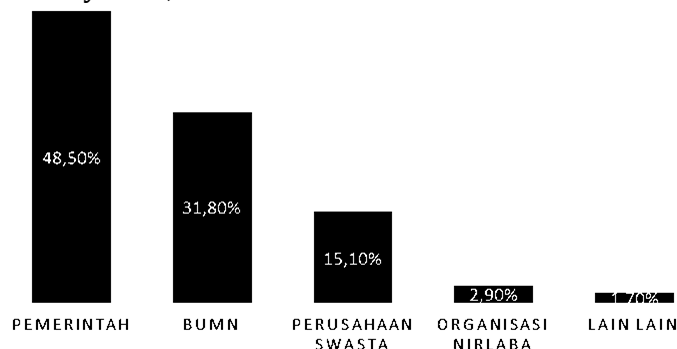
Pendahuluan

Laporan keuangan menjadi sarana bagi suatu entitas untuk mengungkapkan informasi yang dimiliki entitas kepada pihak internal serta pihak eksternal. Pihak yang mempunyai kepentingan dapat melakukan pengukuran kinerja sebuah perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan selaku media tolak ukur (Achmad, 2019). Sebagai keluaran akhir dalam suatu proses akuntansi, laporan keuangan merupakan bagian penting dalam proses pelaporan keuangan karena akan memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan, baik manajemen, investor, kreditor, serta pihak lainnya (Agusputri & Sofie, 2019). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya publikasi laporan keuangan perusahaan yang memuat informasi yang tidak seharusnya sehingga terindikasi adanya praktik berupa manipulasi pada laporan yang disajikan. Ketidaksihonestan penyajian informasi pada laporan keuangan akan berdampak negatif terhadap perusahaan, khususnya kepercayaan pihak eksternal terhadap keberlangsungan perusahaan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mengategorikan *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) bagian spesifik, diantaranya adalah *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), serta *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan).



Gambar 1. Klasifikasi Fraud Menurut ACFE

Kecurangan laporan keuangan dapat diinterpretasikan adanya skenario ketika seorang pegawai secara sengaja mengakibatkan kesalahan dalam menyajikan informasi atau menghilangkan informasi yang bersifat material pada laporan keuangan perusahaan (ACFE, 2020). Apabila ditinjau dari nilai kerugian per kasus yang terjadi, kasus kecurangan pelaporan keuangan menyumbang nilai terbesar. Selain itu, berdasarkan Survei Fraud Indonesia yang dilaksanakan oleh ACFE Indonesia tahun 2019, BUMN menempati peringkat dua berdasarkan lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* sebanyak 31,8%.



Gambar 2. Lembaga di Indonesia yang Paling Dirugikan *Fraud*

Berbagai model kecurangan yang telah dikembangkan untuk menjelaskan alasan yang melatarbelakangi praktik kecurangan. Model kecurangan yang dikembangkan oleh Cressey (1953) adalah *fraud triangle* yang mempunyai 3 (tiga) faktor penyusun, diantaranya *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Pada tahun 2004, model kecurangan berevolusi menjadi bentuk *fraud diamond* yang diungkapkan Wolfe dan Hermanson. Model kecurangan selanjutnya berkembang menjadi model Crowe *fraud pentagon* yang diutarakan Marks (2011). Komponen *competence* (kompetensi) dan *arrogance* (arogansi) melengkapi faktor penyusun yang terdapat pada model *fraud triangle*. Vousinas (2019) memublikasikan *fraud hexagon* yang tersusun dari 6 faktor yang menjadi pemicu terjadinya *fraud*, yaitu Stimulus (Tekanan), Kapabilitas, Kesempatan, Rasionalisasi, Ego (Arogansi), dan Kolusi. Tekanan merupakan motif yang menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan, kesempatan merupakan peluang yang menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan, dan rasionalisasi merupakan pembenaran yang diyakini oleh pelaku bahwa tindakannya bukan merupakan sebuah pelanggaran (Cressey, 1953) Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada (Wolfe & Hermanson, 2004). Arogansi menggambarkan sikap superioritas dan berkurangnya kepekaan karena disebabkan sifat keserakahan dan optimisme bahwa mekanisme pengendalian internal tidak akan diterapkan terhadap seseorang (Marks, 2011). Kolusi merupakan kemufakatan yang dilaksanakan oleh dua pihak ataupun lebih ketika salah satu pihak akan melakukan suatu tindakan untuk tujuan yang jahat (Vousinas, 2019). Salah satu fakta menarik berdasarkan hasil survei ACFE (ACFE Indonesia Chapter, 2020), yaitu sebesar 36% *fraud* dilaksanakan secara kolusif oleh 4 (empat) orang atau lebih dan dapat menimbulkan kerugian lebih dari 10 miliar rupiah. Data tersebut mengindikasikan praktik kecurangan laporan keuangan dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat menimbulkan nominal kerugian yang besar untuk setiap kasus yang terjadi. Fakta tersebut juga relevan dengan model *fraud hexagon* yang merupakan model yang termasuk baru dengan adanya penambahan faktor kolusi.

Alasan utama memilih perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN sebagai objek penelitian adalah karena sebesar 24,3% dari total kapitalisasi dana di pasar modal Indonesia dikuasai oleh perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal tersebut terlihat dalam data kapitalisasi pasar per Desember 2019, dimana beberapa saham perusahaan BUMN termasuk dalam *Big Cap* (Entitas dengan kapitalisasi pasar terbesar) dimana dua dari tiga entitas dengan kapitalisasi pasar terbesar merupakan perusahaan BUMN. Sejalan dengan fakta tersebut, kasus *fraud* yang melibatkan perusahaan BUMN masih terjadi dan melibatkan nominal kerugian keuangan negara yang tergolong besar. Kasus *fraud* yang terjadi umumnya telah berlangsung dalam periode yang lama sehingga bersifat akumulatif dalam merugikan keuangan negara serta dampaknya menimbulkan

kerugian keuangan negara pada nominal yang signifikan. Penelitian ini mempunyai keunikan dibandingkan penelitian terdahulu lantaran melaksanakan analisis memakai gabungan *fraud hexagon* yang tersusun melalui enam faktor dan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen terhadap potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang ditaksir melalui Beneish *M-Score* pada satu model utama. Beneish *M-Score* mempergunakan rasio keuangan menjadi sebuah bentuk statistik yang dilakukan penghitungan menggunakan informasi akuntansi perusahaan dalam memverifikasi kemungkinan bahwa profit yang disajikan perusahaan terindikasi adanya manipulasi. Pengukuran tata kelola perusahaan menggunakan pengukuran yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena menggunakan ukuran berupa pembobotan dari penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2015 perihal Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang lebih lanjut diatur dengan menggunakan SE OJK Nomor 32 tahun 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang tersusun melalui 5 aspek, 8 prinsip, serta 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip yang baik pada tata kelola perusahaan sehingga menjadi lebih komprehensif. Lebih lanjut, objek yang diteliti merupakan entitas BUMN dan afiliasi yang masih cukup jarang untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan berkaitan dengan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang bertautan dengan riset pada bidang audit maupun akuntansi keuangan dengan basis pasar modal. Penelitian ini juga diharapkan menyumbangkan kontribusi untuk melaksanakan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh BUMN maupun OJK terkait dengan penerapan tata kelola kepada perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan petunjuk dalam mendeteksi potensi adanya kecurangan pada laporan keuangan entitas yang bermanfaat bagi auditor, investor, maupun pihak lainnya.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai merupakan metode kuantitatif yang termasuk pada cara untuk melakukan proses pengujian pada teori yang spesifik dengan melakukan penelitian keterkaitan antara variabel yang diuji. Data sekunder menjadi data yang dipergunakan pada proses pengujian. Data sekunder didefinisikan sebagai data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data, contohnya melalui pihak lain atau melalui manuskrip (Sugiyono, 2017). Laporan keuangan, laporan tahunan, maupun laporan lain yang mendukung dalam penelitian dan dipublikasikan untuk umum yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Pada penelitian ini, seluruh perusahaan BUMN maupun entitas afiliasi BUMN yang telah tercatat pada BEI selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercakup dalam populasi penelitian. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik dalam penentuan sampel dengan menggunakan kriteria berikut: (1) Perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang telah tercatat di BEI sejak 31 Desember 2015; (2) Perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tidak masuk golongan sektor keuangan di BEI; dan (3) Perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang mempunyai laporan keuangan maupun laporan tahunan dan telah terpublikasi pada periode pelaporan 2016 s.d. 2020.

Populasi pada penelitian ini ialah semua perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercatat di BEI per 31 Desember 2020 sejumlah 33 perusahaan dengan rincian sejumlah 16 perusahaan merupakan entitas induk BUMN dan 17 perusahaan merupakan entitas afiliasi BUMN. Dengan menerapkan metode *purposive sampling* agar memperoleh data yang sesuai kriteria yang diperlukan, total sampel yang dipakai pada penelitian ini berjumlah 21 sampel. Dengan menggunakan periode pemantauan selama 5 tahun, yaitu tahun 2016 s.d. tahun 2020, maka penelitian ini mempunyai total observasi sejumlah 105 observasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) Apakah faktor *fraud hexagon* berhubungan dengan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan?; (2) Apakah tata kelola perusahaan berhubungan dengan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan? Berlandaskan pada rumusan masalah, berikut ini merupakan tujuan penelitian, yaitu (1) Mengetahui apakah faktor *fraud hexagon* menjadi petunjuk potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan; dan (2) Mengetahui apakah tata kelola perusahaan menjadi petunjuk potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Rahayu (2020) melaksanakan riset mengenai dampak *fraud triangle* atas *fraudulent financial reporting* menggunakan indikator moderasi. Indikator yang digunakan adalah tekanan (stabilitas finansial), peluang (pengawasan yang efektif), dan rasionalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasionalisasi mempunyai dampak yang positif atas indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, sementara itu stabilitas finansial dan pengawasan yang efektif tidak mempunyai dampak yang signifikan atas indikasi kecurangan pada laporan keuangan. Chandra dan Suhartono (2020) melaksanakan penelitian mengenai dampak *fraud diamond* dan *corporate governance* untuk menemukan kemungkinan adanya *fraudulent financial statement*, dengan menggunakan indikator target finansial, kebutuhan finansial personal, tekanan eksternal, karakteristik industri, pemantauan yang efektif, perubahan KAP, dan pergantian direksi perusahaan dalam mengukur *fraud diamond*. Hasil dari penelitian tersebut mendapatkan simpulan bahwa target finansial, karakteristik industri, perubahan KAP, dan pergantian direksi perusahaan mempunyai dampak positif atas kemungkinan adanya *fraudulent financial statement*, sedangkan tekanan eksternal maupun kebutuhan finansial personal serta pemantauan yang efektif tidak mempunyai dampak atas kemungkinan adanya *fraudulent financial statement*. Penelitian lain mengenai model kecurangan dilakukan oleh Bawekes et.al (2018) yang menggunakan model *fraud pentagon* sebagai acuan pengujian kepada *fraudulent financial reporting*. Indikator yang digunakan pada penelitian tersebut adalah target finansial, kestabilan finansial, tekanan eksternal, kepemilikan institusional, pengendalian yang kurang efektif, kapasitas audit eksternal, perubahan auditor, perubahan direktur, dan kuantitas potret pejabat eksekutif tertinggi. Simpulan dari penelitian tersebut mendapatkan fakta yaitu kestabilan finansial dan kuantitas potret pejabat eksekutif tertinggi berdampak signifikan atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, target finansial, tekanan eksternal, kepemilikan institusional, pengendalian yang kurang efektif, kapasitas audit eksternal, perubahan auditor, dan perubahan direktur tidak mempunyai dampak yang signifikan atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Agusputri et al. (Agusputri & Sofie, 2019) melakukan pengujian perihal *fraudulent financial report* yang mempergunakan model *fraud pentagon* pada perusahaan di BEI sektor manufaktur. Indikator yang digunakan ialah tekanan (target finansial, stabilitas finansial, dan tekanan pihak luar), peluang (pemantauan yang belum efektif dan karakter industri), rasionalisasi (perubahan pengaudit dan perilaku membenaran), kompetensi (perubahan direktur), dan arogansi (potret pejabat eksekutif tertinggi). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa target finansial dan pengawasan yang belum efektif memiliki pengaruh positif atas adanya kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya, tekanan pihak luar, karakter industri, perubahan pengaudit, dan perilaku membenaran memiliki pengaruh yang negatif atas adanya kecurangan pelaporan keuangan. Namun, stabilitas finansial, perubahan direktur, serta potret pejabat eksekutif tertinggi tidak mempunyai pengaruh atas kecurangan dalam laporan keuangan. Studi terkait kecurangan pelaporan keuangan yang memakai model *fraud hexagon* dilaksanakan oleh Kusumosari (2020) terhadap entitas tercatat pada BEI khusus sektor manufaktur. Indikator yang dipakai pada studi tersebut adalah tekanan (target finansial, stabilitas finansial, dan tekanan pihak luar), peluang (pemantauan yang belum efektif dan kapasitas pengaudit eksternal), rasionalisasi, kompetensi (gelar CEO), arogansi (dualitas CEO), dan kolusi (koneksi politik dan badan usaha milik negara). Hasil studi tersebut mendapatkan simpulan bahwa target finansial, stabilitas finansial, koneksi politik, badan usaha milik negara, pengawasan yang belum efektif, rasionalisasi, serta dualitas CEO mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas kecurangan pelaporan. Namun, tekanan pihak luar, gelar CEO, dan kapasitas pengaudit eksternal tidak memiliki pengaruh atas kecurangan pelaporan. Riset lainnya yang menggunakan model *fraud hexagon* dilakukan oleh Sari & Nugroho (2020) yang melakukan peninjauan *financial statement fraud* pada entitas tercatat di BEI sektor manufaktur. Variabel yang diaplikasikan pada penelitian tersebut yaitu tekanan (stabilitas finansial, kebutuhan finansial personal, tekanan eksternal, dan target finansial), kapabilitas, peluang (karakteristik industri dan pemantauan yang efektif), rasionalisasi, arogansi, dan kolusi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa faktor tekanan dalam hal kebutuhan finansial personal, faktor kesempatan dalam hal karakteristik industri, arogansi, dan kolusi berpengaruh atas adanya *financial statement fraud*, sedangkan faktor tekanan dalam hal stabilitas finansial, tekanan eksternal, dan target finansial,

kapabilitas, pemantauan yang efektif, dan faktor rasionalisasi tidak memiliki pengaruh atas adanya *fraud* laporan keuangan.

Priswita dan Taqwa (2019) melakukan penelitian mengenai dampak tata kelola perusahaan atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) proksi yang dipakai, diantaranya adalah saham yang dimiliki manajer, dewan komisaris, komite audit, dan persentase saham institusi. Hasil pengujian mendapatkan simpulan bahwa saham yang dimiliki manajer, dewan komisaris, komite audit, dan persentase saham institusi tidak berdampak atas adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Simpulan riset tersebut sejalan dengan riset Kurniawan et al. (2020) yang mengobservasi dampak manajemen laba dan tata kelola perusahaan atas kecurangan laporan keuangan, dengan simpulan riset membuktikan bahwa saham yang dimiliki manajer, saham yang dimiliki institusi, dewan komisaris, komisaris independen, maupun komite audit yang merupakan proksi dari tata kelola tidak ditemukan adanya dampak yang signifikan atas kecurangan laporan keuangan. Sabrina et al. (2020) menguji dampak koneksitas organ tata kelola perusahaan, pemantauan yang belum optimal, serta manajemen laba atas adanya kecurangan pada laporan keuangan. Adapun tata kelola diukur melalui 3 (tiga) parameter, diantaranya komisaris independen, direktur independen, dan komite audit dengan simpulan yang didapatkan adalah ketiga variabel yang digunakan dalam mengukur tata kelola perusahaan tersebut tidak berdampak atas adanya kecurangan laporan keuangan. Simpulan yang berbeda diperoleh pada penelitian yang dilaksanakan Wicaksono & Chariri (2015). Penelitian tersebut menguji prosedur tata kelola atas peluang manipulasi pelaporan keuangan dengan menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu jumlah anggota komisaris, struktur komisaris independen, komite audit, serta efektivitas pemeriksaan internal. Simpulan pengujian tersebut membuktikan bahwa komite audit dan efektivitas pemeriksaan internal mempunyai dampak yang negatif serta signifikan atas adanya manipulasi laporan keuangan, sementara itu jumlah anggota komisaris dan struktur komisaris independen tidak mempunyai dampak atas adanya manipulasi laporan keuangan. Mulyadianto et al. (2020) melakukan penelitian terkait peran *corporate governance* untuk meminimalisir manipulasi pelaporan keuangan dengan memakai 3 (tiga) variabel dalam mengukur *corporate governance*, antara lain kinerja dewan komisaris, keterampilan finansial komite audit, serta saham yang dimiliki insitusi. Hasil penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa kinerja dewan komisaris dan saham yang dimiliki institusi memiliki dampak untuk meminimalisir kecurangan laporan keuangan, sedangkan keterampilan finansial komite audit tidak mempunyai dampak untuk meminimalisir manipulasi pelaporan keuangan. Hidayat (2020) menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dalam mengukur *corporate governance* atas adanya kecurangan pelaporan keuangan yang menjadikan entitas nonkeuangan yang terdaftar di BEI sebagai objek pengamatan. Hasil studi tersebut mendapatkan simpulan bahwa prinsip tata kelola berdasarkan ACGS, meliputi kewajiban dewan, kewenangan pemilik saham, pemenuhan fungsi pihak yang berkepentingan, pemenuhan hak yang setara kepada pemilik saham, serta pengungkapan dan keterbukaan berdampak positif untuk meminimalisir potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Teori agensi menjadi teori utama yang dirujuk pada penelitian ini. Teori agensi menguraikan ikatan antara pemegang saham selaku *principal* dengan manajer selaku *agent*. Ketika terdapat perikatan yang menghubungkan antara suatu pihak (*principal*) dengan pihak lainnya (*agent*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk kepentingan pemegang saham, maka akan timbul suatu hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan yang terjadi adalah pendelegasian kewenangan untuk pengambilan keputusan bisnis dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dari pemegang saham selaku *principal* kepada manajemen selaku *agent*. Adanya hubungan prinsipal dan agen akan mendorong adanya informasi yang asimetri. Asimetri informasi adalah terjadinya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena posisi yang dimiliki seorang *agent* memungkinkan untuk memperoleh lebih banyak informasi yang berkaitan dengan perusahaan apabila dibandingkan dengan informasi yang didapatkan *principal* sehingga berpotensi menimbulkan celah yang memicu potensi adanya manipulasi laporan keuangan (Sabrina et al., 2020). Celah yang ditimbulkan akan memberikan kesempatan kepada *agent* untuk mengutamakan kepentingan pribadi dengan cara menyembunyikan informasi yang seharusnya perlu disampaikan kepada *principal* maupun dengan memanipulasi informasi yang tersaji pada laporan

keuangan yang berpotensi mengecoh pembaca laporan keuangan ketika melakukan pengambilan keputusan (Nurbaiti & Hanafi, 2017). Eisenhardt (1989) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hal yang berkaitan dengan sifat manusia dan menjadi landasan teori agensi, antara lain adalah manusia cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), manusia dibatasi oleh pikiran yang logis dan masuk akal (*bounded rationality*), dan kecenderungan manusia untuk meminimalisir dan menjauhi risiko (*risk averse*). Faktor sifat yang dimiliki manusia selaku makhluk individu akan mengakibatkan manajemen sebagai *agent* cenderung akan memprioritaskan tujuan pribadi dibandingkan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan pertikaian antara *principal* dan *agent* yang dikenal dengan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan yang timbul akan mendorong manajemen untuk bertindak seolah-olah sedang mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi sesungguhnya manajemen bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Perbedaan kepentingan yang terjadi perlu diselaraskan dengan pembuatan kontrak yang akan menimbulkan biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mengutarakan bahwa biaya keagenan tersusun dari 3 (tiga) jenis, antara lain sebagai berikut: (1) Biaya yang perlu ditanggung pihak *principal* dalam menaksir, mengobservasi, dan mengendalikan perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (*monitoring cost*); (2) Biaya yang perlu ditanggung *agent* sebagai akibat dari tindakan *agent* untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan *principal* (*bonding cost*); dan (3) Biaya yang terjadi karena *agent* tidak dapat menyelaraskan sepenuhnya kepentingannya dengan kepentingan *principal* sehingga mengakibatkan menurunnya kesejahteraan *principal* (*residual loss*).

Kecurangan (*fraud*) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama menurut ACFE (2020), antara lain *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *financial statement fraud* (kecurangan pelaporan keuangan). Arens et al. (2012) mendefinisikan bahwa *fraud* merupakan kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan. Tuanakotta (2013) menginterpretasikan *fraud* merupakan segala bentuk tindakan ilegal yang dicirikan dengan adanya penyembunyian, pelanggaran, ataupun penipuan atas suatu kepercayaan. Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (2019) secara spesifik mendefinisikan *fraudulent statement* merupakan bentuk manipulasi laporan keuangan dan laporan non-keuangan berupa salah saji (*misstatement*) dengan mekanisme *overstatement* maupun *understatement* yang umumnya dilakukan manipulasi terhadap akun aset dan akun pendapatan pada laporan keuangan. Pada akhirnya, tindakan manipulasi dalam pelaporan keuangan termasuk perbuatan yang menyalahi aturan dan termasuk dalam lingkup korupsi.

Tabel 1. Variabel Independen

Variabel	Proksi	Cara pengukuran
Tekanan	Stabilitas finansial	(total Aset t-Total Aset t-1) / (Total Aset t)
Kapabilitas	Tidak adanya pergantian direksi	Kode 1 (satu) apabila perusahaan tidak melakukan pergantian direksi Kode 0 (nol) apabila perusahaan melakukan pergantian direksi
Kolusi	Transaksi penjualan kepada pihak berelasi	Penjualan kepada pihak berelasi/jumlah bruto penjualan
Kesempatan Rasionalisasi	Pemantauan yang efektif Pergantai auditor	Total jumlah Dewan Komisaris Independen Kode 1 (satu) apabila perusahaan melakukan pergantian auditor Kode 0 (nol) apabila perusahaan tidak melakukan pergantian auditor
Arogansi	Koneksi politik	Kode 1 (satu) apabila komisaris utama dan/atau direktur utama memiliki hubungan politik Kode 0 (nol) apabila komisaris utama dan/atau direktur utama tidak memiliki hubungan politik
Tata kelola	Penerapan tata kelola perusahaan	Kepatuhan terhadap pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang diatur dalam SE OJK Nomor 32 tahun 2015

Penelitian ini menggunakan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang diprosikan melalui model Beneish *M-Score* (FFR) sebagai variabel dependen. Beneish (1999) memper-

kenalkan model *M-Score* melalui jurnal *The Detection of Earnings Manipulation* dengan menyajikan profil dari perusahaan sampel manipulator, karakteristik unik, dan model yang disarankan untuk melakukan deteksi potensi adanya manipulasi pada laporan keuangan perusahaan. Beneish menggunakan 8 (delapan) karakteristik dalam model *M-Score* yaitu Indeks hari penjualan dalam piutang (DSRI), Indeks margin kotor (GMI), Indeks kualitas aset (AQI), Indeks pertumbuhan penjualan (SGI), Indeks depresiasi (DEPI), Indeks beban penjualan, umum, dan administrasi (SGAI), Indeks Leverage (LVGI), dan Total akrual terhadap total aset (TATA). Apabila nilai *M-Score* yang didapatkan $> (-2,22)$ maka terindikasi kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, seandainya *M-Score* yang didapatkan $< (-2,22)$ maka tidak terindikasi potensi terdapat kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Model Beneish tidak dapat menentukan secara pasti apakah laporan benar-benar telah dimanipulasi atau tidak, namun hanya probabilitasnya saja. Untuk memastikan terkait laporan keuangan telah dilakukan manipulasi ataupun tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan audit forensik. Adapun berikut merupakan rumus yang digunakan agar memperoleh *M-Score*.

$$M\text{-Score} = -4,84 + 0,92 (\text{DSRI}) + 0,528 (\text{GMI}) + 0,404 (\text{AQI}) + 0,892 (\text{SGI}) + 0,115 (\text{DEPI}) - 0,172 (\text{SGAI}) + 4,679 (\text{TATA}) - 0,327 (\text{LVGI}).$$

Terdapat 7 (tujuh) variabel independen yang dipakai dalam penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami dampak variabel independen yang tersusun dari Tekanan (FS), Kapabilitas (CoD), Kolusi (RPT), Kesempatan (EM), Rasionalisasi (CiA), Arogansi (PC), dan Tata Kelola Perusahaan (CG) atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan (FFR) sebagai variabel dependen. Berikut adalah model utama penelitian ini.

$$FFR = \alpha + \beta_1 FS + \beta_2 CoD + \beta_3 RPT + \beta_4 EM + \beta_5 CiA + \beta_6 PC + \beta_7 CG + \varepsilon$$

Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam mengevaluasi regresi logistik, yaitu uji kelayakan model secara keseluruhan, uji tingkat mutu kecocokan model, dan uji signifikansi parameter secara individual (Widarjono, 2010). Dalam penelitian ini, kelayakan model secara keseluruhan dilakukan dengan melihat nilai -2LL terhadap nilai chi square tabel pada tingkatan signifikansi 5% serta *degree of freedom* sesuai jumlah variabel independen. Tahapan selanjutnya dilakukan uji *omnibus test* untuk melihat signifikansi koefisien model dengan tujuan untuk melihat adanya pengaruh yang signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian model tingkat mutu kecocokan model dilakukan melalui uji *Hosmer and Lemeshow* dengan tujuan dapat memperkirakan kesesuaian probabilitas yang diprediksi dan probabilitas yang diobservasi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh model dalam menjelaskan probabilitas model terhadap variabel independen, pengujian dilanjutkan dengan melihat koefisien *pseudo r square*. *Pseudo r square* diukur berdasarkan *Nagelkerke R Square*. Tahapan berikutnya dilakukan identifikasi data *outlier* pada variabel independen untuk menghindari hasil pengukuran yang kurang baik. Pengujian signifikansi parameter secara individual dilaksanakan agar dapat mengetahui derajat signifikansi dampak variabel independen secara individual kepada variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan uji signifikansi parameter secara individual, fakta hasil penelitian yang ditemukan tersaji melalui Tabel 2. Berikut merupakan penjelasan hasil penelitian berdasarkan pada pengujian yang menggam-barkan korelasi antara variabel dependen dan variabel independen:

Pengaruh Tekanan atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa rasio perubahan aset perusahaan sebagai proksi dari tekanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Menurut teori agensi, terdapat kemungkinan manajemen mempunyai tujuan yang tidak selaras dengan pemegang saham. Ketika terdapat perikatan yang menghubungkan antara pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* dengan manajemen yang bertindak sebagai *agent* dalam melaksanakan suatu tugas untuk kepentingan pemegang saham, maka akan menimbulkan hubungan keagenan (Jensen &

Meckling, 1976). Hubungan yang terjadi adalah pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan bisnis dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dari pemegang saham kepada manajemen. Hal ini mengakibatkan manajemen dapat mewujudkan keuntungan semaksimal mungkin bagi perusahaan melalui kinerja yang akan tercermin melalui laporan keuangan sehingga situasi ini akan menimbulkan tekanan bagi manajemen. Perusahaan BUMN maupun entitas afiliasi dibawahnya sebagai entitas yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah mempunyai maksud dan tujuan yang berlainan dengan perusahaan swasta yang mengutamakan keuntungan untuk pemegang saham. Menurut UU No 19 Tahun 2003 perihal BUMN, secara umum pendirian BUMN adalah bertujuan untuk menyumbang kontribusi pada perekonomian nasional dan secara khusus untuk berkontribusi pada penerimaan negara, mengutamakan profit, menyediakan kebermanfaatn umum melalui penyediaan barang dan/jasa yang menjadi keperluan masyarakat, merintis pekerjaan yang belum dilakukan oleh sektor privat, serta menyediakan bantuan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan adanya tekanan bagi manajemen.

Tabel 2. Uji Signifikansi Parameter Secara Individual

Variabel	Robust		
	B	Sig.	Exp(B)
FS	5,321	0,025**	204,573
CoD	1,013	0,048**	2,753
RPT	1,584	0,071*	4,872
EM	-1,362	0,002***	0,256
CiA	1,442	0,004***	4,320
PC	-0,569	0,146	0,566
CG	-0,016	0,489	0,984
CONSTANT	1,773	0,008***	5,889
-2LL Beg	144,406		
-2LL End	102,351		
<i>p-value</i>	0,0004		
Pseudo R ²	29,12%		

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian (Annisya et al., 2016; Bawekes et al., 2018; Kusumosari, 2020; M. R. Sari & Rofi, 2020; Septriani & Handayani, 2018; Wicaksana & Suryandari, 2019) yang menyatakan bahwa rasio perubahan aset sebagai pengukuran dari stabilitas finansial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Kapabilitas atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kapabilitas yang diukur dengan tidak adanya pergantian direksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Direksi yang mempunyai kemampuan dapat memanfaatkan posisinya dalam mempengaruhi orang lain yang dapat menjadi penentu terjadinya *fraud* sehingga diperlukan adanya pergantian direksi secara periodik untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam jangka waktu yang lama serta untuk tujuan perbaikan kinerja dari manajemen sebelumnya (Septriani & Handayani, 2018). Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 perihal BUMN, organ BUMN yang mempunyai tanggung jawab mengenai urusan berkaitan dengan keperluan, tujuan BUMN, dan menjadi perwakilan terkait urusan hukum adalah Direksi. Akan tetapi, pergantian direksi dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS maupun RUPSLB meskipun masa jabatan direksi belum mencapai 5 (lima) tahun. Seperti pada kasus PT Garuda Indonesia, ketika direktur yang menjabat pada saat terjadinya manipulasi pada laporan keuangan Perseroan periode tahun buku 2018 dicopot dari jabatannya melalui mekanisme perusahaan terbuka pada tahun 2019. Selain itu, faktor sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk individu akan menyebabkan direksi untuk lebih memprioritaskan kepentingan pribadi apabila dibandingkan dengan kepentingan perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah keagenan. Akibat yang ditimbulkan adalah dapat menimbulkan dorongan adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Penelitian (Himawan & Wijanarti, 2020; Septriani & Handayani, 2018; Siddiq et al., 2017) selaras dengan simpulan penelitian ini yang menemukan bahwa tidak adanya pergantian direksi

berdampak positif atas potensi kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, temuan pada penelitian ini berbeda dari penelitian (Agusputri & Sofie, 2019; Bawekes et al., 2018; Mintara & Hapsari, 2021; S. P. Sari & Nugroho, 2020) yang menemukan bahwa tidak adanya pergantian direksi tidak mempunyai dampak atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Kolusi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kolusi yang diukur dengan proporsi transaksi penjualan kepada pihak berelasi mempunyai pengaruh yang positif dan cukup signifikan. Perusahaan BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah tidak jarang untuk melakukan transaksi antar sesama perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercermin pada pengungkapan transaksi kepada pihak berelasi yang dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Young (2005) menyatakan bahwa transaksi kepada pihak berelasi dapat meningkatkan risiko inheren karena akan meningkatkan keterlibatan manajemen dalam menentukan keputusan serta faktor kompleksnya transaksi kepada pihak berelasi dapat memicu risiko kekeliruan penyajian yang material lantaran beresiko adanya manipulasi oleh pihak manajemen.

Penelitian (Fitri et al., 2019; S. P. Sari & Nugroho, 2020) selaras dengan temuan penelitian ini yang mendapatkan fakta bahwa kolusi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan dan pendapat Young (2005) terkait transaksi dengan pihak berelasi memiliki kaitan dengan tindakan *fraud* yang terjadi pada sebuah entitas. Namun, temuan pada penelitian ini berlainan dengan penelitian Rachmawati dan Marsono (2014) dan Jaunanda & Silaban (2020) yang menemukan bahwa transaksi kepada pihak berelasi tidak mempunyai pengaruh atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Kesempatan atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa kesempatan yang diproksikan melalui jumlah dewan komisaris independen mempunyai dampak yang negatif dan sangat signifikan. Salah satu upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *fraud* adalah dengan membatasi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pemantauan yang efektif akan mendorong perusahaan mencapai keadaan ideal untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, keadaan yang ideal tidak selalu terjadi di setiap perusahaan. Pemantauan yang tidak efektif terjadi karena sistem pengawasan internal perusahaan tidak berjalan dengan baik (Agusputri & Sofie, 2019). Sesuai dengan teori agensi, dampak dari pemantauan yang tidak efektif akan menimbulkan peluang kepada suatu pihak untuk merealisasikan tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan sehingga akan menimbulkan biaya keagenan. Skousen et al. (2009) berpendapat bahwa *fraud* cenderung didapati pada entitas yang mempunyai jumlah dewan komisaris eksternal yang lebih sedikit. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 perihal Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, seluruh perusahaan BUMN maupun entitas afiliasi yang telah terdaftar di BEI sudah mematuhi ketentuan jumlah minimum Dewan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Afiah & Aulia, 2020; Razali & Arshad, 2014; P. N. Sari & Husadha, 2020; Tiffani & Marfuah, 2015) yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah komisaris independen pada sebuah perusahaan akan meminimalisir potensi terjadi kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, simpulan ini berlainan dengan temuan (S. P. Sari & Nugroho, 2020; Suhartono, 2020) yang mendapatkan simpulan bahwa besaran dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Rasionalisasi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa rasionalisasi yang diproksikan melalui pergantian auditor mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan. Rasionalisasi didefinisikan sebagai perilaku justifikasi yang dilaksanakan oleh aktor *fraud* atas tindakan yang telah dilakukan (Marks, 2011). Auditor eksternal berperan untuk mengawasi dan memeriksa penyajian laporan keuangan oleh manajemen. Perusahaan yang memiliki intensitas mengganti auditor lebih sering dimaknai sebagai perwujudan rasionalisasi untuk menghapus jejak *fraud* oleh auditor sebelumnya (Bawekes et al., 2018). Dalam teori agensi, masalah keagenan yang muncul akan memunculkan

kan biaya keagenan. Salah satu biaya keagenan yang akan terjadi adalah pemegang saham menanggung biaya untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perbuatan yang dilakukan oleh manajemen (*monitoring cost*). Teori agensi menjadi dasar untuk pelaksanaan audit yang berkualitas oleh pemegang saham melalui pengeluaran *monitoring cost* sehingga diharapkan perilaku manajemen dapat tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham. Contoh kasus yang memancing atensi masyarakat adalah manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yang termasuk perusahaan BUMN pada tahun buku 2018. Berdasarkan riwayat laporan tahunan yang dirilis melalui laman resmi perusahaan, pada periode sebelum dan setelah tahun 2018 selalu terdapat adanya pergantian auditor eksternal.

Hasil penelitian ini selaras dengan simpulan penelitian (Loebbecke et al., 1989; Mintara & Hapsari, 2021; Rahayu, 2020; Saputra & Kesumaningrum, 2017) yang menemukan bahwa rasionalisasi yang diproksikan melalui adanya pergantian auditor eksternal mempunyai dampak signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Jejak kecurangan yang dapat ditemukan oleh auditor terdahulu serta motivasi untuk menutupi informasi yang sesungguhnya dapat disembunyikan melalui pergantian auditor. Namun, temuan ini tidak selaras dengan simpulan penelitian (Agusputri & Sofie, 2019; Bawekes et al., 2018; Rusmana & Tanjung, 2019; S. P. Sari & Nugroho, 2020), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pergantian auditor atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Arogansi atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji, ditemukan bahwa arogansi yang diukur dengan koneksi politik tidak mempunyai pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini diakibatkan karena terdapatnya koneksi politik di sektor eksekutif, legislatif, maupun yudikatif justru mendorong seseorang yang memiliki jabatan untuk lebih meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap jabatan yang telah dipercayakan terlebih karena faktor pengawasan dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat akan lebih intens apabila terjadi suatu praktik yang kurang sesuai. Selain itu hal ini juga didukung masih maraknya praktik rangkap jabatan di lingkup pemerintahan, khususnya komisaris masih umum terjadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10 Tahun 2020 perihal syarat serta prosedur penetapan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, tidak ada larangan untuk memiliki jabatan di sektor pemerintahan.

Hal ini selaras dengan penelitian Sai (2013), Jullani et al. (2020), Kartikawati et al. (2020), dan Sabrina et al. (2020) yang mendapati bahwa koneksi politik terbukti tidak berdampak signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, temuan penelitian ini tidak selaras dengan temuan Stuart & Wang (2016) dan Matangkin et al. (2018) yang menemukan bahwa koneksi politik mempunyai dampak positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Adanya perbedaan arah hasil penelitian terkait dengan koneksi politik merupakan hal yang menarik untuk ditelaah lebih jauh.

Pengaruh Tata Kelola atas Potensi Adanya Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian, ditemukan bahwa tata kelola yang diukur melalui proporsi penerapan rekomendasi tata kelola entitas terbuka sesuai SE OJK Nomor 32 Tahun 2015 tidak mempunyai pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Faktor yang menjadi penyebab penerapan tata kelola tidak mempunyai pengaruh atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan adalah diakibatkan oleh pengungkapan atas kepatuhan terhadap rekomendasi tata kelola perusahaan terbuka oleh OJK bersifat arahan dan *explanatory* (penjelasan) sehingga terdapat entitas yang belum mengikuti arahan secara serentak. Berkaitan dengan rekomendasi yang terdapat pada pedoman untuk melakukan penerapan aspek dan prinsip Pedoman Tata Kelola telah sejalan kepada kebutuhan dan/atau kondisi entitas, maka entitas diharapkan dapat melaksanakan rekomendasi tersebut. Namun, apabila rekomendasi yang terdapat pada Pedoman Tata Kelola belum selaras dengan keadaan entitas sehingga menyebabkan rekomendasi yang ada belum dapat diterapkan oleh entitas, maka entitas harus menguraikan argumen mengapa penerapan rekomendasi belum dijalankan sesuai Pedoman Tata Kelola. Alternatinya, entitas dapat menguraikan cara lainnya terkait penerapan aspek dan prinsip

Pedoman Tata Kelola tersebut. Secara khusus untuk entitas BUMN, tata kelola yang baik juga telah diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN. Faktor lainnya yang merupakan penyebab penerapan tata kelola tidak berpengaruh atas potensi adanya kecurangan pada laporan keuangan suatu entitas adalah atas aturan tersebut belum terdapat mekanisme untuk mengevaluasi ketepatan penerapan karena entitas hanya menyatakan sudah mengikuti/belum yang dilengkapi dengan penjelasan tambahan. Selain itu, faktor lainnya adalah beragamnya karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penerapan aturan cenderung memperhitungkan industri, sektor, maupun skala dan kompleksitas suatu entitas.

Hal ini selaras dengan penelitian (Guritno et al., 2020; Kurniawan et al., 2020; Nursiam & Ghaisani, 2021; Priswita & Taqwa, 2019; Sabrina et al., 2020). Namun, simpulan yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Hidayat, 2020; Mulyadianto et al., 2020; Widodo & Syafruddin, 2017; Yasmin et al., 2020), yang memberikan simpulan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif mengindikasikan bahwa peningkatan rasio perubahan aset cenderung meningkatkan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN dan entitas afiliasi yang berbeda dengan perusahaan swasta dapat meningkatkan adanya tekanan bagi manajemen.

Kapabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif menunjukkan bahwa tidak adanya pergantian direksi cenderung meningkatkan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Pergantian direksi pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS maupun RUPSLB meskipun masa jabatan direksi belum mencapai 5 (lima) tahun. Diperlukan adanya pergantian Direksi secara periodik sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang pada periode waktu yang lama serta untuk tujuan perbaikan kinerja dari manajemen sebelumnya.

Kolusi mempunyai pengaruh yang positif dan cukup signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mempunyai intensitas yang lebih sering terkait dengan transaksi penjualan terhadap pihak berelasi cenderung meningkatkan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Perusahaan BUMN terkadang melakukan transaksi antar sesama perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN yang tercermin pada pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi dapat meningkatkan risiko inheren potensi adanya kecurangan.

Kesempatan mempunyai pengaruh yang negatif dan sangat signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen turut menurunkan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan pada perusahaan. Seluruh perusahaan BUMN dan entitas afiliasi yang telah terdaftar di BEI telah memenuhi ketentuan jumlah minimal Dewan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 perihal Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rasionalisasi mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Arah positif mengindikasikan bahwa pergantian auditor cenderung meningkatkan potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Intensitas pergantian auditor yang lebih sering pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN cenderung mengindikasikan adanya upaya dari pihak manajemen untuk menghapus jejak *fraud* oleh auditor sebelumnya.

Arogansi terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal ini terjadi karena aturan yang

ada belum mengatur secara spesifik terkait larangan praktik rangkap jabatan di lingkup pemerintahan sehingga masih umum terjadi dan menjadi perhatian publik dalam beberapa kasus.

Tata Kelola Perusahaan terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN dan entitas afiliasi BUMN. Hal ini terjadi karena pengungkapan atas kepatuhan terhadap rekomendasi tata kelola perusahaan terbuka oleh OJK bersifat arahan dan *explanatory* (penjelasan) serta belum terdapat mekanisme untuk mengevaluasi ketepatan penerapan tata kelola perusahaan terbuka.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penggunaan sampel pada penelitian ini dibatasi pada perusahaan BUMN dan entitas afiliasi yang tercatat di BEI sejumlah 21 perusahaan sesuai dengan penentuan kriteria sampel serta periode penelitian pada tahun 2016 s.d. 2020. Selain itu, penelitian ini hanya memanfaatkan data sekunder tanpa bantuan metode pengumpulan data lainnya sehingga dimungkinkan adanya perbedaan dengan kondisi nyata di lapangan sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini yaitu penggunaan basis data informasi keuangan berupa angka yang terdapat pada laporan keuangan sehingga indikasi adanya kecurangan dalam laporan keuangan terbatas pada *M-Score* yang merupakan hasil perkiraan dari suatu perhitungan.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memakai sampel berupa seluruh perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat memakai proksi pengukuran yang berbeda pada variabel dependen maupun variabel independen sehingga dapat menangkap fenomena dengan perspektif yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan indikator lainnya yang belum dipergunakan pada penelitian ini agar mendapatkan simpulan yang bervariasi serta dapat mengombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif agar dapat menangkap fenomena di lapangan dengan lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2020). Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2020 global fraud study. In *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei fraud Indonesia 2019*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
- Achmad, T. (2019). Pengaruh kualitas audit dan auditor switching terhadap kecurangan pelaporan keuangan: Kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 110. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.380>
- Afiah, E. T., & Aulia, V. (2020). Financial stability, financial targets, effective monitoring dan rationalization dan kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Revenue*, 01(01), 90–100. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.9>
- Agusputri, H., & Sofie, S. (2019). Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan menggunakan analisis fraud pentagon. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 105–124. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049>
- Annisya, M., Lindrianasari, L., & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan fraud diamond. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 23(1), 72–89. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4307/0>
- Anti-Corruption Learning Center KPK. (2019). *Modul materi tindak pidana korupsi*.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and assurance services: An integrated approach*. Boston: Prentice Hall.
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon terhadap fraudulent financial reporting (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–134. <https://doi.org/10.52062/jakd.v13i1.1429>
- Beneish, M. D. (1999). The detection of earnings manipulation. *Financial Analysts Journal*, 55(5), 24–36. <https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296>

- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Fitri, F., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4), 63–72. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5>
- Guritno, D. P., Probowulan, D., & Maharani, A. (2020). Deteksi kecurangan laporan keuangan melalui variabel corporate governance. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 220–229. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1232>
- Hidayat, F. (2020). *Analisis pengaruh corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan nonkeuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018*. STIE Perbanas Surabaya.
- Himawan, F. A., & Wijanarti, R. S. (2020). Analisis pengaruh fraud pentagon terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), 137–154. <https://doi.org/10.55886/esensi.v23i2.201>
- Jaunanda, M., & Silaban, D. P. (2020). Pengujian fraud pentagon terhadap resiko financial fraudulent reporting. *Ultima Management : Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 147–158. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v12i2.1581>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jullani, J., Mukhzarudfa, M., & Yudi, Y. (2020). Detection of fraudulent financial reporting using the perspective of the fraud pentagon theory. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(3), 158–168. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/10812>
- Kurniawan, A. A., Hutadjulu, L. Y., & Simanjuntak, A. M. A. (2020). Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1461>
- Kusumosari, L. (2020). *Analisis kecurangan laporan keuangan melalui fraud hexagon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/40840/>
- Loebbecke, J., Eining, M., & Willingham, J. (1989). Auditors' experience with material irregularities: Frequency, nature, and detestability. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 9(Fall), 1–28.
- Marks, J. (2011). Why the fraud triangle is no longer enough. In *Crowe Horwath LLP*.
- Maryadi, A. D., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Robiansyah, A. (2020). Pengaruh fraud pentagon dalam mendeteksi fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i1.104>
- Matangkin, L., Ng, S., & Mardiana, A. (2018). Pengaruh kemampuan manajerial dan koneksi politik terhadap reaksi investor dengan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel mediasi. *Simak*, 16(02), 181–208. <https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.42>
- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan melalui fraud pentagon framework. *Perspektif Akuntansi*, 4(1), 35–58.
- Mulyadianto, A., Kirana, D. J., & Wijayanti, A. (2020). Kontribusi corporate governance dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 297–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.369>
- Nurbaiti, Z., & Hanafi, R. (2017). Analisis pengaruh fraud diamond dalam mendeteksi tingkat accounting irregularities. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 167–184. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.167-184>

- Nursiam, & Ghaisani, H. M. (2021). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. *Seminar Nasional Ahmad Dahlan Accounting Fair*, 1–17.
- Priswita, F., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1705–1722.
- Rachmawati, K. K., & Marsono. (2014). *Pengaruh faktor-faktor dalam perspektif fraud triangle terhadap fraudulent financial reporting* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/43002/>
- Rahayu, D. (2020). Analisis pengaruh fraud triangle terhadap fraudulent financial reporting dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–30.
- Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. (2014). Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 243–253. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.032>
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2019). Identifikasi kecurangan laporan keuangan dengan fraud pentagon studi empiris BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(4). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1545>
- Sabrina, O. Z., Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh koneksitas organ corporate governance, ineffective monitoring dan manajemen laba terhadap fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 109–122. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.11>
- Sai, C. N. (2013). The impact of politically-connected executives in fraudulent financial reporting: Evidence based on the H shares1. *African Journal of Business Management*, 7(18), 1875–1884. <https://doi.org/10.5897/AJBM12.530>
- Saputra, M. A. R., & Kesumaningrum, N. D. (2017). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi fraudulent financial reporting dengan perspektif fraud pentagon pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 121–134.
- Sari, M. R., & Rofi, M. A. (2020). Faktor-faktor yang memotivasi kecurangan laporan keuangan. *Journal of Management and Business Review*, 17(1), 79–107. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>
- Sari, P. N., & Husadha, C. (2020). Pengungkapan corporate governance terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 46–56.
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2020). Financial statements fraud dengan pendekatan vousinas fraud hexagon model: Tinjauan pada perusahaan terbuka di Indonesia. *1st Annual Conference of Ihtifaz*, 409–430.
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23.
- Siddiq, R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). Fraud Pentagon dalam mendeteksi financial statement. *Seminar Nasional Dan the 4Th Call Syariah Paper, ISSN 2460-0784*, 1–14.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In *International Journal of Quality & Reliability Management* (Vol. 32, Issue 3, pp. 53–81). [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Stuart, T., & Wang, Y. (2016). Who cooks the books in China, and does it pay? Evidence from private, high-technology firms. *Strategic Management Journal*, 37(13), 2658–2676. <https://doi.org/10.1002/smj.2466>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, S. (2020). Analisis pengaruh fraud diamond dan good corporate governance dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya fraudulent financial statement. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 175–207. <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.93>

- Tiffani, L., & Marfuah. (2015). Deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 112–125. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Mendeteksi manipulasi laporan keuangan*. Salemba Empat.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wicaksana, E. A., & Suryandari, D. (2019). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di bursa efek indonesia. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 4(1), 44–59.
- Wicaksono, G. S., & Chariri, A. (2015). Mekanisme corporate governance dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 552–563. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9671>
- Widarjono, A. (2010). *Analisis statistika multivariat terapan*. UPP STIM YKPN.
- Widodo, A., & Syafruddin, M. (2017). Pengaruh pengungkapan struktur corporate governance terhadap kecurangan pelaporan keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18198>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of Fraud. *Journal of Accounting Research*, 32(1), 18–54.
- Yasmin, S. N., Ramadhaniyah, R., & Komaruudin, K. (2020). The effect of profit management and corporate governance towards financial statement fraud. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 16(2), 138. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.11447>
- Young, B. (2005). Related-party transactions: Why they matter and what is disclosed. *The Corporate Governance Advisor*, 13(4), 1–7.